

ABSTRAK

Penanganan dan Kendala Bawaslu dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilu

Tahun 2024 di Provinsi Lampung

(Studi Kasus Bawaslu Provinsi Lampung)

Oleh :

Nurlaili Zahra Fajriyah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan dan kendala yang dihadapi Bawaslu dalam mengatasi pelanggaran pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan melibatkan 5 (lima) orang informan yang terdiri atas 3 (tiga) orang dari Bawaslu, 1 (satu) orang dari KPU, dan 1 (satu) orang dari media Lampung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran pemilu yaitu diklasifikasi sesuai dengan jenis pelanggarannya antara lain, pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran kode etik. Pada saat menangani pelanggaran pemilu, Bawaslu dihadapi oleh beberapa kendala yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kendala aspek normatif dan kendala aspek teknis. Kendala aspek normatif adalah kendala yang berkaitan dengan norma dan kebijakan yang berlaku yaitu meliputi keterbatasan wewenang, peraturan yang tidak jelas atau tumpang tindih, prosedur yang rumit dan panjang, serta intervensi atau tekanan politik. Sedangkan kendala aspek teknis adalah kendala yang berkaitan dengan tata cara dalam pelaksanaannya yaitu meliputi keterbatasan SDM, teknologi dan infrastruktur, logistic dan peralatan, proses pelaporan dan pengumpulan bukti, koordinasi antar lembaga, serta anggaran yang dibutuhkan.

Kata Kunci : Bawaslu, Pemilu, Pelanggaran, Penanganan, Kendala

ABSTRACT

Bawaslu's Handling and Obstacles in Overcoming 2024 Election Violations in Lampung Province

(Study on Bawaslu Lampung Province)

By

Nurlaili Zahra Fajriyah

This research aims to determine the handling and obstacles faced by Bawaslu in overcoming violations in the 2024 general election in Lampung Province. This research used a qualitative descriptive approach involving 5 (five) informants consisting of 3 (three) people from Bawaslu, 1 (one) person from the KPU, and 1 (one) person from the Lampung media. The results of this research show that the handling used by the Lampung Province Bawaslu in handling election violations is classified according to the type of violation, including administrative violations, criminal violations and code of ethics violations. When handling election violations, Bawaslu faced several obstacles which were divided into 2 (two), namely normative aspects and technical aspects. Normative aspect constraints are constraints related to applicable norms and policies, which include limited authority, unclear or overlapping regulations, complex and lengthy procedures, as well as political intervention or pressure. Meanwhile, technical aspect constraints are obstacles related to implementation procedures, including limited human resources, technology and infrastructure, logistics and equipment, reporting processes and evidence collection, coordination between institutions, and the required budget.

Keywords: *Bawaslu, Election, Violations, Handling, Obstacles*